

## MODEL *MONOCOURSE* UNTUK PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS KONSELOR SEKOLAH

Yosef\*

**Abstract:** School counselor is one of helping professions that particularly focuses on the growth and problem solving of student development. The implication of population served target is that school counselors also have to develop. They have to advance their competence, both in theory and practice. Internal and external obstacles in developing their professionalism should be anticipated through various breakthroughs like using the monocourse model in college. It is assumed that this model can accommodate the requirement of improving the school counselors' competence through a process that gives priority to skillfulness and accountability in having mandate. Through this instruction model breakthrough, it is expected that school counselors do not only own the basic competence when they finish the strata1, but also own the continuation competence, which is obtained as their profession demand. This competence is required in order to become professional school counselors, in theory and practice as well.

---

\* Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang.

**Kata kunci:** monocourse, konseling sekolah, pengembangan profesionalitas, konselor sekolah

Pendidikan konselor sekolah atau secara kurang akurat sebelumnya disebut guru pembimbing telah diselenggarakan, utamanya melalui program strata-1 di perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan ilmu pendidikan (LPTK). Sejumlah nama diberikan untuk program pendidikan konselor sekolah misalnya bimbingan dan penyuluhan, bimbingan dan konseling, dan psikologi pendidikan dan bimbingan. Sekarang ini kehadiran konselor di sekolah menengah sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kondisi psikologis anak usia pertumbuhan yang sangat bergejolak dan mencari jati diri sehingga acap kali menimbulkan permasalahan tersendiri dengan lingkungannya terutama dengan keluarga dan teman-teman di lingkungan sekolahnya.

Arus informasi yang sangat terbuka lebar dan mudah diakses oleh para remaja ini memunculkan persoalan tersendiri, mulai dari menurunnya prestasi belajar siswa hingga konflik di antara teman sebaya. Kondisi ini menuntut kehadiran seorang konselor sekolah yang memiliki sensitivitas dan empati terhadap kondisi mereka. Situasi ini tidak hanya menuntut seorang konselor yang mengerti kondisi siswanya tetapi juga menuntut kapasitas intelektual dari seorang konselor. Tingkat intelektual ini diperoleh melalui sarana pengembangan keilmuannya.

Pada era 1980-an, untuk mengisi kebutuhan konselor sekolah di sekolah menengah, sejumlah perguruan tinggi membuka program diploma sebagai pelengkap dari program strata-1. Program ini bersifat sementara dan setelah tujuannya tercapai maka program ini dihentikan. Kebutuhan yang tinggi terhadap konselor sekolah juga disikapi melalui pendekatan permisif yaitu menugaskan guru-guru mata pelajaran sebagai guru pembimbing. Guru yang berminat terlebih dahulu mendapat pelatihan, sekurang-kurangnya 180 jam (Prayitno, 1987). Seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, para konselor sekolah sekurang-kurangnya

menghadapi dua tantangan besar yakni peningkatan kualifikasi bagi para lulusan program diploma dan pengembangan kompetensi utama minimum (KUM). Tantangan kedua berkaitan dengan pemantapan dan kemutakhiran. Kedua tantangan ini perlu disikapi secara arif karena peran konselor sekolah sebagai *helping profession* sering dipersepsikan oleh administrator dan guru secara tidak tepat (Schmidt, 1999; Gale & Austin, 2003).

Penyelenggaraan pengembangan profesionalitas konselor sekolah pasca pendidikan tinggi masih termasuk minim. Sejumlah peneliti, seperti Juntika (1998), Wibowo (1999), dan Wahab (2005), melaporkan betapa antusiasnya konselor sekolah dalam menyambut model konseling yang ditawarkan kepada mereka. Mereka mengaku tidak banyak mengikuti perkembangan dunia konseling dan model yang ditawarkan sangat membantu dalam pengembangan program konseling di sekolah masing-masing. Minimnya pengembangan profesionalitas itu diduga terkait dengan sejumlah kendala, seperti kelangkaan materi pemutakhiran teori dan praktik, keterbatasan ajang peningkatan kemampuan melalui penataran, pelatihan, atau semiloka. Situasi ini berdampak pada pelayanan konseling yang dinilai statis, tidak optimal, tidak memuaskan, dan menjadi pertanyaan komunitas sekolah tentang manfaat langsung pelayanan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Myrick (1993).

Pengembangan profesionalitas konselor sekolah sejatinya dilakukan karena sejumlah alasan. Baker (1981) menyebutkan konselor sekolah perlu mempertahankan kebaruan kemampuannya supaya mereka dapat terus-menerus merevitalisasi program bimbingan dan konseling dan diri mereka sendiri. Comas, Cecil, dan Cecil (1987) menyampaikan konselor perlu mengembangkan kemampuan mereka seiring dengan meningkatnya tekanan sosial pada siswa. Tekanan tersebut apabila dilihat pada konteks saat ini termasuk ketidakutuhan keluarga, masalah ekonomi keluarga yang dapat mengancam anak putus sekolah, kemampuan orang tua dalam mendampingi anak dalam belajar termasuk persiapan menempuh ujian nasional, pengaruh media massa terhadap perkembangan anak, kriminalitas, kesehatan, dan pengaruh lingkungan sosial yang semakin memburuk.

Pengembangan profesionalitas konselor sekolah yang bersifat pasca-jabatan, termasuk mereka yang telah memenuhi KUM, tak pelak lagi sangat diperlukan, sementara sampai saat ini program yang dimaksudkan untuk mendukung perwujudannya belum tersedia secara memadai. Artikel ini bertujuan untuk menggagas pengkayaan pengembangan profesionalitas konselor sekolah yang *suitable* dengan praktik program pelayanan konseling di sekolah menengah saat ini.

### Kompetensi Konselor Sekolah

Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan perkembangan dan pemecahan masalah perkembangan individu (*helping profession*) yang bersifat psikopedagogis dalam bingkai budaya (Depdiknas, 2004). Sebagai ahli pelayanan perkembangan, konselor harus memiliki seperangkat kompetensi, terdiri atas pengetahuan, sikap, dan kecakapan yang diperlukan dalam memberikan layanan profesional, bermisikan pendidikan, pengembangan, dan pemecahan. Blocher (1975) mensarikan tujuh puluh empat kompetensi konselor yang dikumpulkan dari sejumlah dosen dan mahasiswa program konseling. Meskipun kompetensi tersebut diakui belum tentu sesuai bagi semua konselor namun paling tidak mereka mampu memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dimiliki untuk bertumbuh kembang menjadi konselor profesional. Kompetensi tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap sebagai konselor, penguasaan keilmuan yang berkaitan dengan *helping profession*, kecakapan konseling, kemampuan dalam penelitian dan pengembangan, dan etika konseling. Depdiknas (2004) mengidentifikasi kompetensi umum minimal-kemampuan yang bersifat esensial dan pokok serta tidak boleh dikurangi, yang harus dikuasai oleh semua keahlian konseling—ke dalam lima area, yakni kompetensi pengembangan kepribadian, landasan keilmuan dan keterampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya, dan berkehidupan bermasyarakat profesi. Apabila jabaran masing-masing pengelompokkan kompetensi tersebut dicermati lebih lanjut, keduanya relatif sama.

Menjadi konselor sekolah profesional tidak terwujud dengan sendirinya. Ketika seseorang dinyatakan lulus dalam menempuh pendidikan di bidang konseling sekolah. Perguruan tinggi, sejatinya hanya menyiapkan kompetensi dasar atau utama minimal pada jenjang strata-1, memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi konselor sekolah (Depdiknas, 2004). Kompetensi ini bukanlah menjadi titik akhir dari suatu upaya, tetapi merupakan langkah awal untuk berkembang menjadi seorang konselor sekolah profesional. Ia dituntut untuk mengembangkan keilmuan dasar tersebut melalui berbagai pelatihan dan kursus-kursus sehingga memungkinkan ia memiliki kemampuan sebagai konselor profesional. Pada kenyataannya tidak semua konselor memiliki profisiensi dan kematangan yang sama dalam kompetensi dasar tersebut. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan umumnya berkisar antara 2,0 - 4,00 merupakan ukuran objektif tentang betapa beragamnya penguasaan kompetensi dasar calon konselor sekolah. Beberapa kompetensi akan mencapai kematangan seiring dengan pengalaman profesional sementara kompetensi lainnya akan menurun karena tidak dirasakan pentingnya dilakukan pengembangannya. Penguatan dan pengkayaan kompetensi mau tidak mau harus dilakukan oleh konselor sekolah, baik atas inisiatif sendiri atau institusi tempatnya bernaung.

### **Pengembangan Profesionalitas Konselor Sekolah dan Kendalanya**

Konselor sekolah perlu secara teratur memutakhirkan pengetahuan dan kecakapan profesional mereka. Bowers dan Hatch (2002) mengatakan bahwa upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dalam jabatan, menjadi anggota perkumpulan profesi, atau melanjutkan pendidikan ke tingkat pasca sarjana. Pendidikan dalam jabatan dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan konselor sekolah sehingga mencapai tingkat kualifikasi tertentu. Pendidikan dimaksud dapat berbentuk pendidikan penyeteraan kualifikasi strata-1 konseling, penataran berjenjang, dan pelatihan khusus (Depdiknas, 2004). Karena konselor sekolah diposisikan sebagai seorang pendidik maka sesuai

dengan UU Nomor 14 Tahun 2005, kebanyakan dari mereka mengharapkan peran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Peran Depdiknas di pusat atau daerah untuk memfasilitasi harapan itu pada kenyataannya belum optimal. Kalaupun tersedia, misalnya dalam bentuk tak berstruktur, penataran, lokakarya, atau pelatihan, frekuensi dan jumlah konselor yang dilibatkan sangat terbatas. Seringkali program pendidikan dalam jabatan ini bersifat sentralistik, tidak dirancang berdasarkan analisis kebutuhan setempat sehingga materi dan strategi yang ditawarkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan individual konselor sekolah dan sekolah di mana mereka bekerja.

Pada umumnya di setiap Kantor Dinas Diknas Kota/Kabupaten terdapat personel pengawas bimbingan dan konseling (Depdikbud, 1994). Para personel pengawas ini memiliki tugas yang tidak berbeda dari pengawas-pengawas lainnya. Namun banyak pihak meragukan kualitas pengawas terkait latar pendidikan dan pengalaman profesional mereka sebagai konselor sekolah. Kasus pertama, pengawas dimaksud tidak berpendidikan tinggi di bidang konseling namun karena struktur pengawasan menuntut keberadaannya, mereka yang memiliki latar belakang non-konseling dengan sedikit pelatihan atau tanpa pelatihan ditugaskan sebagai pengawas. Kasus kedua, ketika diangkat sebagai pengawas mereka belum memiliki pengalaman yang memadai sebagai konselor sekolah. Promosi jabatan terkait dengan peningkatan pendidikan khususnya konseling menyebabkan pengawas tidak memiliki cukup waktu untuk berfungsi sebagai konselor sekolah. Pada masing-masing kasus, pengawas tidak mampu membantu pengembangan profesionalitas guru pembimbing yang menjadi tanggung jawab dan pengawasannya.

Seiring dengan profesi konseling sekolah yang terus berubah dan berkembang, konselor sekolah dapat menjaga dan meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai kegiatan temu ilmiah seperti menghadiri konferensi dan pertemuan perkumpulan profesional. ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) merupakan satu-satunya perkumpulan profesional yang tersedia bagi konselor sekolah. Asosiasi ini di samping memiliki pengurus pusat juga

mempunyai cabang-cabang sampai ke tingkat kabupaten/kota. ABKIN juga menerbitkan satu jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun. Hingga saat ini, temu ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas konselor sekolah, baik yang diselenggarakan oleh ABKIN beserta cabang-cabangnya, masih terbatas. Situasi yang sama juga terjadi pada penyebaran informasi melalui jurnal ilmiah tersebut.

Peningkatan kompetensi konselor sekolah juga dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan pasca sarjana, program magister dan doktor di bidang konseling. Sayangnya karena berbagai kendala, utamanya ketersediaan guru besar, perguruan tinggi yang menawarkan kedua program tersebut hingga saat ini masih sangat terbatas. Kendala lain ialah mahalnya biaya pendidikan sehingga sulit bagi kebanyakan konselor sekolah untuk menempuh pendidikan pasca sarjana. Sementara itu beasiswa yang disediakan oleh Dikdasmen bagi calon mahasiswa sangat terbatas.

### **Model *Monocourse* di Perguruan Tinggi**

Peningkatan kemampuan konselor sekolah perlu dilakukan melalui diversifikasi program, di samping ketiga model yang telah diuraikan di atas. Salah satu upaya alternatif yang layak diwacanakan ialah program pengembangan profesionalitas konselor sekolah secara terstruktur melalui model *monocourse* di perguruan tinggi. Apa yang dimaksud dengan model *monocourse* tersebut? Istilah *monocourse* belum pernah digunakan dalam literatur manapun dan untuk sementara dipilih guna mendeskripsikan gagasan dasarnya. *Monocourse* adalah sejenis program pelatihan kemampuan tunggal dan spesifik konseling yang berguna bagi konselor sekolah dalam mengefektifkan program pelayanan mereka di sekolah. Model *monocourse* bersifat pengkayaan atau peningkatan kecakapan guru pembimbing secara teoritik dan praktik.

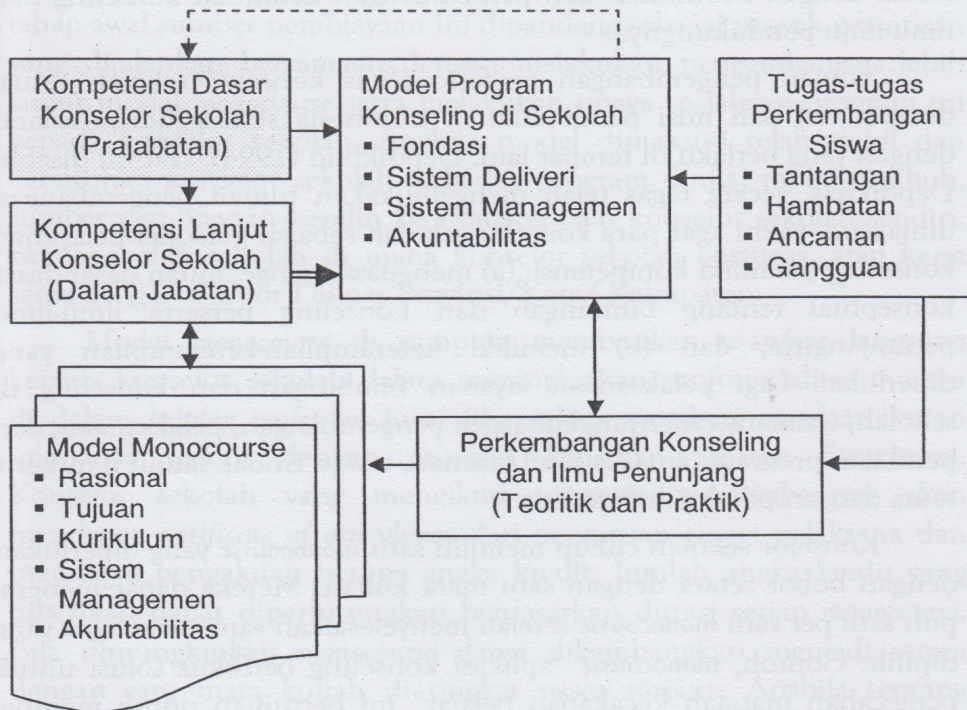
Mengapa *monocourse* diperlukan di perguruan tinggi? Program pengembangan konselor sekolah dengan menggunakan model *monocourse* diselenggarakan di perguruan tinggi dan bukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi. Pemilihan perguruan tinggi

didasarkan atas sejumlah argumen. Perguruan tinggi memungkinkan untuk membuka program yang bersifat *continuing education* (Myrick, 1993). Calon peserta program ialah konselor sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Institusi ini relatif memiliki sumber daya manusia yang lebih memadai dibandingkan orang per-orang yang berperan sebagai pengembang. Mereka mampu merancang program pengembangan berdasarkan hasil-hasil penelitian atau sekurang-kurangnya kajian analitik. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program pengembangan termasuk perpustakaan dan laboratorium konseling. Lembaga pendidikan ini memiliki akses yang lebih baik untuk melakukan kerja sama dengan lembaga tempat konselor sekolah bernaung dan dapat mempertahankan suatu program yang bersifat tetap bukan ad hoc sebagaimana berlaku di institusi lain. Terakhir, perguruan tinggi dapat menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program yang ditawarkan.

Seorang lulusan strata-1 konseling memiliki kemampuan keilmuan dasar untuk menjadi seorang konselor sekolah. Untuk menjadi profesional, ia dituntut untuk lebih banyak memiliki 'jam terbang' dalam rangka membangun kepekaan dan empati terhadap permasalahan siswa yang harus ia hadapi. Pada tahap ini, ia menjadi konselor yang memiliki kompetensi dasar sebagai konselor sekolah.

Untuk meningkatkan kemampuannya maka seorang konselor sekolah dengan kompetensi dasar ini dituntut memiliki kompetensi lanjutan sebagai konselor sekolah. Kesemua tuntutan ini bertujuan untuk membentuk model program konseling sekolah yang memiliki fondasi kompetensi konselornya dalam rangka menjawab tugas-tugas mengiringi perkembangan siswa. Semua hal ini menuntut adanya perkembangan kemampuan para konselor tersebut melalui penguasaan ilmu-ilmu penunjang lainnya, baik secara teoritik maupun praktik. Model *monocourse* dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut sehingga dapat dicapai kompetensi konselor sekolah yang profesional didukung oleh sebuah sistem pendidikan dan kurikulum yang akuntabilitas.





Bagan 1: Konsep Model *Monocourse* untuk Pengembangan Profesionalitas Konselor Sekolah

Bagaimana konsep model *monocourse*? Pengembangan profesionalitas konselor sekolah dalam model *monocourse* dirancang berdasarkan hasil-hasil analisis KUM dan kompetensi lanjut konselor sekolah, permasalahan pelayanan konseling di sekolah berdasarkan model program konseling yang ada di sekolah, permasalahan perkembangan siswa, dan *trend* perkembangan dunia konseling terkini dan ke depan (Bagan 1). Kurikulum dirancang secara diversifikatif dan dinamis terdiri atas sejumlah *monocourse* sehingga mampu memenuhi kebutuhan konselor sekolah yang berbeda-beda dan tidak terlalu memberatkan konselor untuk menempuhnya. Jumlah *monocourse* dapat tidak terbatas

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan konseling dan ilmu-ilmu pendukungnya.

Tujuan pengembangan profesionalitas konselor sekolah sesuai dengan visi dan misi pendidikan di Indonesia sesungguhnya selaras dengan yang berlaku di tempat lain. Depdikbud (1994), saat ini disebut Depdiknas, secara tegas telah mengemukakan tujuan pengembangan dimaksud, yakni agar para konselor sekolah sebagai personel pelayanan konseling memiliki kompetensi: (a) menguasai pengetahuan dasar-dasar konseptual tentang bimbingan dan konseling beserta ilmu-ilmu penunjangnya, dan (b) memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, utamanya menyangkut aspek pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program, analisis hasil layanan, upaya tindak lanjut dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Konselor sekolah cukup memilih satu *monocourse* yang diperlukan dengan bobot setara dengan satu mata kuliah. Mereka dapat menempuh satu per satu *monocourse* setelah menyelesaikan satu *monocourse* yang dipilih. Contoh, *monocourse* “aplikasi konseling berfokus solusi untuk pemecahan masalah kecakapan belajar” ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan konseling penanganan persoalan-persoalan belajar siswa berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Steve de Shazer. *Monocourse* tersebut dijadwalkan akan berlangsung sebanyak dua belas kali pertemuan tatap muka terdiri dari enam kali pertemuan untuk penguasaan konsep, tiga kali praktikum simulatif, dan tiga kali praktikum terbimbing. Waktu pelaksanaan dimaksud dirancang secara lentur, disesuaikan dengan kesempatan konselor sekolah. *Monocourse* dapat dilaksanakan di akhir pekan, di sore hari, atau pada hari libur sekolah. Jumlah dan durasi setiap pertemuan ditentukan berdasarkan kajian analisis materi yang dipandang esensial bagi seorang guru pembimbing. Pada contoh di atas setiap pertemuan misalnya berdurasi 150 menit, setara dengan 3 satuan kredit semester.

Pembiayaan merupakan faktor penting yang acapkali menghambat pelaksanaan program pengembangan profesionalitas konselor sekolah. Ada sejumlah sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberadaan program ini. Sumber pertama berasal dari perguruan tinggi

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan konseling dan ilmu-ilmu pendukungnya.

Tujuan pengembangan profesionalitas konselor sekolah sesuai dengan visi dan misi pendidikan di Indonesia sesungguhnya selaras dengan yang berlaku di tempat lain. Depdikbud (1994), saat ini disebut Depdiknas, secara tegas telah mengemukakan tujuan pengembangan dimaksud, yakni agar para konselor sekolah sebagai personel pelayanan konseling memiliki kompetensi: (a) menguasai pengetahuan dasar-dasar konseptual tentang bimbingan dan konseling beserta ilmu-ilmu penunjangnya, dan (b) memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, utamanya menyangkut aspek pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program, analisis hasil layanan, upaya tindak lanjut dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Konselor sekolah cukup memilih satu *monocourse* yang diperlukan dengan bobot setara dengan satu mata kuliah. Mereka dapat menempuh satu per satu *monocourse* setelah menyelesaikan satu *monocourse* yang dipilih. Contoh, *monocourse* “aplikasi konseling berfokus solusi untuk pemecahan masalah kecakapan belajar” ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan konseling penanganan persoalan-persoalan belajar siswa berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Steve de Shazer. *Monocourse* tersebut dijadwalkan akan berlangsung sebanyak dua belas kali pertemuan tatap muka terdiri dari enam kali pertemuan untuk penguasaan konsep, tiga kali praktikum simulatif, dan tiga kali praktikum terbimbing. Waktu pelaksanaan dimaksud dirancang secara lentur, disesuaikan dengan kesempatan konselor sekolah. *Monocourse* dapat dilaksanakan di akhir pekan, di sore hari, atau pada hari libur sekolah. Jumlah dan durasi setiap pertemuan ditentukan berdasarkan kajian analisis materi yang dipandang esensial bagi seorang guru pembimbing. Pada contoh di atas setiap pertemuan misalnya berdurasi 150 menit, setara dengan 3 satuan kredit semester.

Pembiayaan merupakan faktor penting yang acapkali menghambat pelaksanaan program pengembangan profesionalitas konselor sekolah. Ada sejumlah sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberadaan program ini. Sumber pertama berasal dari perguruan tinggi

pelaksana sebagai wujud pengabdian mereka kepada masyarakat. Pada tahap awal sumber pembiayaan ini dipandang sebagai proyek perintisan yang dijalankan bersamaan dengan melakukan pengembangan lebih lanjut model *monocourse* serta melakukan upaya sosialisasi program ini kepada konselor sekolah. Apabila model dimaksud telah stabil dan kebutuhan konselor sekolah terhadap program dinilai mulai tumbuh, sumber pembiayaan beralih ke swadana oleh konselor sekolah sendiri, swadana oleh sekolah di mana konselor sekolah bertugas, atau kerja sama dengan Kantor Diknas Provinsi/Kota/ Kabupaten.

Model *monocourse* di samping memberikan manfaat langsung kepada konselor sekolah dalam meningkatkan profesionalitas mereka di dalam *helping profession* juga diharapkan memberi manfaat ikutan utamanya terkait dengan promosi kenaikan jabatan fungsional. Konselor sekolah yang mengikuti program pengembangan akan mendapat *certificate of attendance* dari perguruan tinggi pelaksana dan mendapat pengakuan berupa angka kredit. Jumlah angka kredit yang diberikan dapat diperhitungkan berdasarkan durasi setiap *monocourse*. Bila dimungkinkan *monocourse* dapat dikembangkan menjadi setara dengan satu mata kuliah di tingkat pasca sarjana. Apabila seorang konselor melanjutkan pendidikan, mereka mendapat pengurangan mata kuliah karena telah menempuh sejumlah *monocourse*. Konselor sekolah dimungkinkan untuk mengikuti *monocourse* sebanyak kebutuhan yang dirasakannya dan jumlah *monocourse* yang ditawarkan. Semakin banyak mereka menempuh *monocourse* akan semakin banyak pula mereka mendapatkan angka kredit tersebut. Meskipun demikian mereka harus mengingat tujuan utama *monocourse* dan tidak menjadikan perolehan angka kredit sebagai tujuan utama.

## **Kesimpulan**

Permasalahan terkait perkembangan peserta didik semakin hari semakin kompleks dan perlu direspon secara bijak, termasuk oleh konselor sekolah. Salah satu pendukung penting untuk menyediakan pelayanan efektif terkait permasalahan ini ialah dimilikinya kompetensi dasar plus kompetensi lanjut bagi para konselor sekolah. Upaya

pemilikan ini merupakan satu proses yang *inheren* dalam diri setiap konselor sekolah dan dapat dilakukan melalui program yang bersifat struktural dan nonstruktural. Jika hanya mengandalkan kompetensi dasar, konselor sekolah diyakini berkesulitan dalam menyediakan pelayanan yang bermisikan pendidikan, pengembangan, dan pemecahan masalah yang terdapat dalam dunia yang terus berubah.

Kepedulian utama pengembangan kemampuan konselor sekolah dengan model apapun ialah peningkatan kemampuan mereka sebagai konselor sekolah profesional. Asumsi yang digunakan ialah peningkatan profesionalitas konselor sekolah berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan siswa dan karena program konseling sekolah harus selalu berkembang, seiring dengan adanya hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terkait pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa maka konselor sekolah pun sudah selayaknya berkembang.

Berbagai program pengembangan profesionalitas konselor sekolah yang tersedia masih memiliki kelemahan mendasar dalam jangkauan, kesesuaian dengan kebutuhan, dan pembiayaan. Model *monocourse* sebagai program pematangan kemampuan konselor sekolah patut dijadikan pilihan karena diperkirakan dapat menjembatani berbagai kelemahan model pengembangan yang tersedia pada saat ini. Pemilihan perguruan tinggi sebagai basis model *monocourse* memberikan berbagai keunggulan utamanya sebagai pelaksana yang cekatan, bermandat, dan berakuntabilitas.

### Daftar Pustaka

- Baker, S. 1981. *School Counselor's Handbook: A Guide for Professional Growth and Development*. Boston: Allyn & Bacon.
- Bowers, J.L. & Hatch, P.A. 2002. *The National Model for School Counseling Programs*. Alexandria: The American School Counselor Association.

- Comas, R., Cecil, J., & Cecil C. 1987. "Using Expert Opinion to Determine Professional Development Needs of School Counselor". Dalam *The School Counselor*, No. 35.
- Depdikbud. 1994. *Kurikulum Sekolah Tingkat Pertama (SLTP): Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. 2004. *Dasar Standarisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- Gale, A.E. & Austin, B.D. 2003. "Professionalism's Challenges to Professional Counselors' Collective Identity". Dalam *Journal of Counseling and Development* No.81 (1).
- Juntika, N. 1998. *Bimbingan Komprehensif: Model Bimbingan dan Konseling di SMU*. Disertasi. Bandung: IKIP Bandung.
- Myrick, R.D. 1993. *Development Guidance and Counseling: A Practical Approach*. Minneapolis: Education Media Corporation.
- Prayitno, dkk. 1997. *Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Schmidt, J.J. 1999. *Counseling in Schools: Essential Services and Comprehensive Programs*. Boston: Allyn and Bacon.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wahab, R. 2003. *Bimbingan Sosial-Pribadi Berbasis Model Perkembangan (Studi Pengembangan Pedoman Umum Penyusunan Program Bimbingan bagi Anak Berbakat Akademik)*. Disertasi. Bandung: Program Pasca Sarjana UPI.
- Wibowo, M.E. 2000. *Model Bimbingan Kelompok Berbasis Sistem*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: IKIP Bandung.

ISSN 1412 - 1697

# INTIZAR

*Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*

Vol. 14, Nomor 1, Juni 2008



PUSAT PENELITIAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

**INTIZAR**  
**Jurnal Kajian Agama Islam dan Keberagamaan**  
ISSN 1412 - 1697  
Vol. 14, Nomor 01, Juni 2008, hlm. 1 -118

---

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember dalam edisi berbahasa Indonesia. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis di bidang Agama Islam dan Keberagamaan. ISSN 1412 - 1697

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah

**Ketua Penyunting**

Nyayu Khadijah

**Wakil Ketua Penyunting**

Muhammad Isnaini

**Penyunting Pelaksana**

Abdul Karim Nasution

Abdul Hadi

Amilda

Robul Izzatin

**Alih Bahasa**

Ahmad Syarifuddin

Dian Herlina

**Mitra Bestari**

Abdurrahman Mas'ud (IAIN Walisongo); Yusufhadi Miarso (UNJ Jakarta); M. Samsul Hady (UIN Malang); M. Zainuddin (UIN Malang); J. Suyuthi Pulungan (IAIN Raden Fatah); M. Sirozi (IAIN Raden Fatah).

**Pelaksana Tata Usaha**

Fikri Darmawan

Hasyim

Kholijah

Ahmad Zaidan Zachir

Marsiyem

Alamat Penyunting Pelaksana dan Tata Usaha : Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, Kampus IAIN Raden Fatah. Jl. Prof.K.H. Z.A. Fikry KM 3,5 Palembang. Telpon (0711) 354-668. Fax. (0711) 356-092. E-mail: [puslit\\_radenfatah@yahoo.com](mailto:puslit_radenfatah@yahoo.com).  
Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dengan format seperti tercantum pada halaman belakang (persyaratan naskah).